

## Regulasi Pelayanan Kesehatan Di Fase Tanggap Darurat Pasca Bencana Gempa Bumi Di Indonesia : Review Literatur Komprehensif

NOVIANTI<sup>1\*</sup>, BASUKI SUPARTONO<sup>2</sup>

Prodi Magister Hukum FH UPN Veteran Jakarta, Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

\*Correspondence author: Novianti, [noviantievi0708@gmail.com](mailto:noviantievi0708@gmail.com), Indonesia

Received: 23-11-2023

Revised: 22-01-2024

Accepted: 07-02-2024

**Abstrak** . Hampir dalam jumlah besar warga negara Indonesia menempati area resiko bencana alam meliputi bencana gempa bumi. Musibah gempa bumi yang disertai evakuasi korban bencana beresiko menyebabkan timbulnya problem kesehatan. Sudah banyak ditulis mengenai regulasi pelayanan kesehatan bencana di masa tanggap darurat pasca gempa bumi namun tulisan tersebut belum komprehensif. Tujuan penulisan ini melakukan review komprehensif terhadap hal tersebut. Metode: literature review narative menggunakan mesin pencari data Google dan Google Scholar. Artikel jurnal ilmiah sepuluh tahun terakhir dan berbahasa Indonesia. Hasil: Didapatkan 16 literature berbahasa Indonesia dari tahun 2013-2023. Kesimpulan: Belum ada standar pelayanan minimal tanggap darurat pasca gempa bumi. Saran: Segera dibuat regulasi terbaru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat bencana alam melalui usulan Undang-Undang Baru yang mengatur standar minimal pelayanan kesehatan saat situasi bencana alam gempa bumi.

**Kata Kunci:** Penanggulangan Bencana, Pelayanan Kesehatan, Regulasi

**Abstract.** Most of Indonesia's population lives in areas that are vulnerable to natural disasters, including earthquakes. An earthquake disaster followed by evacuation has the potential to cause health problems. Much has been written about the regulation of disaster health services during the post-earthquake emergency response period, but this writing is not yet comprehensive. The aim of this writing is to conduct a comprehensive review of this matter. Method: literature review narrative using the data search engine Google and Google Scholar. Scientific journal articles from the last ten years and in Indonesian. Results: Obtained 16 pieces of Indonesian language literature from 2013-2023. Conclusion: There are no minimum service standards for post-earthquake emergency response. Suggestion: Immediately create new regulations to meet the needs of the community during natural disasters through a proposed New Law that regulates minimum service standards health during natural disaster situations such as earthquakes.

**Keywords:** Disaster Management, Health Services, Regulations

### Pendahuluan

Negara Indonesia dilihat dari aspek geologis serta hidrologis, termasuk area resiko terjadi bencana alam, karena berada di titik persatuan tiga lempeng aktif tektonik Lempeng Indo-Australia. Kondisi alam Indonesia menyediakan sumber daya alam

melimpah yang nilainya tak terhitung (Triatmojo, 2021). Wilayah Indonesia merupakan tempat bertemunya jalur-jalur vulkanik utama dunia. Rangkaian gunung berapi Asia Pasifik atau rangkaian sirkum Asia Pasifik (Cincin Api) melintasi wilayah Indonesia. Namun kondisi ini menyimpan potensi bencana. Risiko timbulnya musibah alam contohnya gunung vulkanik yang meletus, gempa bumi, tsunami, dan bencana longsor sangat tinggi sehingga mengancam kehidupan masyarakat. (Supartono et al., 2022)

Peraturan pemerintah melalui Perundang-Undangan Tahun 2007 Nomor 24 yang mengatur perihal Penanggulangan Bencana. Peran serta institusi dunia internasional dan lembaga asing nonpemerintah. (Republik Indonesia, 2007) yang diatur pada Bab III Pasal 7 ayat 1 bagian d dan ayat 2. Hal ini juga diatur dalam Bab VI Pasal 30 dalam Peraturan Undang-Undang Tahun 2007 Nomor 24 yang mengatur Penanggulangan Bencana. Serta diatur oleh Pemerintah dalam Peraturan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Aspek Peranan Serta Organisasi internasional dan Institusi Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana Namun dalam pelaksanaan penanganan di lapangan saat situasi bencana banyak kendala yang dihadapi namun dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala. Hal ini menjadi latar belakang penulis dalam penelitian ilmiah yang berjudul “Regulasi Pelayanan Kesehatan dalam Situasi Bencana Alam di Indonesia (Ramdan, 2020).

#### Urgensi

Pemerintah Indonesia melihat adanya pendesakan dalam kebutuhan akan regulasi yang menangani perihal Pelayanan Situasi Tanggap Musibah Bencana Alam di Indonesia. Saat ini Peraturan Perundang-undangan Tahun 2007 (UU) Nomor 24 perihal Penanggulangan Bencana dianggap belum memenuhi. Undang-undang ini dianggap masih banyak kekurangan dan memerlukan penyempurnaan. Undang-Undang. Peraturan tersebut diharapkan bukan hanya mengatur unsur cepat reaksi tanggap, Namun juga memiliki fokus pada semua pengaturan mengatasi bencana dilakukan dari mitigasi, siap tanggap, reaksi cepat darurat hingga rehabilitasi. Sehingga dalam hal ini memiliki nilai urgensi yang tinggi dalam mengatasinya (Idris & Ziaulhaq, 2022).

## Metode Penelitian

Artikel menggunakan metode literature review narative yang bersumber dari data Google dan Google Scholar serta artikel jurnal penelitian terbaru terkait tema penelitian. Menggunakan Bahasa Indonesia dari tahun 2013-2023. Literature Review ini tidak dalam arti hanya melakukan literasi, tapi cenderung pada tujuan penulisan terperinci serta menyeluruh perihal tema penelitian sebelumnya. Sumber data yang digunakan dalam karya tulis ini bersifat sekunder didapatkan bukan dari mengalami secara pengalaman langsung, namun berasal dari hasil penulisan pada penelitian sebelumnya. Data sekunder yang bersumber data sekunder yang diperoleh dapat dalam bentuk artikel atau jurnal yang terkait tema yang memakai databased dari google dan google scholar (Hafid et al., 2022). Kriteria inklusi telah ditetapkan penulis meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jangka waktu rentang publikasi jurnal adalah 10 tahun sebelum penelitian ini
2. Penggunaan Bahasa Inggris dalam Jurnal Internasional (Bahasa Inggris) dan Bahasa Indonesia dalam Jurnal Nasional (Bahasa Indonesia)
3. Subjek dalam penulisan yang diteliti ini adalah orang atau manusia.
4. Tema isi artikel menyesuaikan tema penulisan yang diteliti.



5. Kata kunci yang digunakan yaitu : penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, regulasi

## Hasil dan Pembahasan

Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan kebijakan yang secara umum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan akan penanganan situasi bencana pada fase tanggap darurat bencana di Indonesia menjadi hal yang harus segera dipenuhi, Tanggapan dari pemangku kebijakan dan regulasi menyangkut ke berbagai aspek tidak hanya sektor kesehatan namun juga ekonomi dan lain lain. Hasil penelusuran literature penelitian didapatkan 16 literature berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris dari tahun penelitian selama tahun 2013-2023 yang menunjukkan bahwa Regulasi Pelayanan Kesehatan situasi bencana alam yang ada saat ini belum mengatur semua kebutuhan pelayanan kesehatan saat terjadi situasi bencana alam di Indonesia. Adapun Hasil Pencarian data disajikan dalam tabel berikut (Riyadi et al., 2019)

Hasil Tabel 1. Ekstraksi Data *Literature Review*

| NO | JUDUL<br>JURNAL                                    | PENULIS                                         | NAMA<br>JURNAL                       | HASIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kerangka Kerja Menghadapi Kesiapan Bencana ( 2019) | Lukmanul Hakim.                                 | Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana | Kesiapsiagaan adalah ilmu serta muatan yang oleh pemerintah dilakukan pengembangan , institusi profesional cepat tanggap darurat dan pemulihan, masyarakat, dan perorangan yang secara efektif mengatasi, menanggapi, dan pulih dari potensi dampak bahaya. Rencana tanggap bencana (disaster plan) adalah suatu catatan perencanaan yang melukiskan langkah-langkah dan prosedur pencegahan dan penanggulangan bencana. Kesiapsiagaan dapat digambarkan sebagai persiapan untuk menanggapi keadaan yang butuh cepat tanggap bencana. |
| 2  | Evaluasi Kebijakan Pemulihan Sektor Permukiman     | J.Bohari, . Puspasari, Wilopo., Maarif, Rahardi | Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana | Kegiatan pemulihan dan rekonstruksi dijelaskan dalam regulasi berupa Peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2017 Nomor 6 tentang pelaksanaan pemulihan serta renovasi konstruksi setelah                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |                                                                                                                       |                                                        |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | n Pasca<br>Bencana<br>dengan<br>Metode<br>CIPP Studi<br>Kasus:<br>Gempabumi<br>Pidie Jaya<br>(2021)                   |                                                        |                                                                      | bencana. Pedoman pelaksanaan pemulihan serta renovasi pascabencana, khususnya meningkatkan partisipasi, memprioritaskan koordinasi, menerapkan tata kelola yang baik, menjaga keberlanjutan, melaksanakan pembangunan progresif dalam skala besar. Memprioritaskan, untuk pembangunan ulang menjadi lebih aman dan lebih baik berdasarkan pengurangan risiko bencana, peningkatan kapasitas dan kemandirian. dan mengutamakan persamaan gender, golongan beresiko, disabilitas serta adil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 | Aspek<br>Hukum<br>Dalam<br>Mitigasi<br>Bencana di<br>Masyarakat<br>Desa<br>Senepo<br>Kabupaten<br>Ponorogo.<br>(2020) | Rosando,<br>A. F.,<br>Widhiarto,<br>H., &<br>Raissa, A | Jurnal<br>Leverage,<br>Engagement,<br>Empowerment<br>of<br>Community | Ditemukan perkembangan positif pada model sistem penanganan terjadinya bencana alam sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor Tahun 2007 Nomor 24, bahwa dengan adanya regulasi dan sistem perundangan yang baru, maka landasan hukum berlaku secara umum tidak terbatas pada hal khusus serta mengikat untuk semua pihak. unit, komunitas dan organisasi non-pemerintah. Apabila dengan model lama masih menerapkan tanggap darurat bencana, model baru memiliki sejumlah proses, mulai dari mitigasi bencana, tanggap darurat, pemulihan, hingga rekonstruksi. Peran masyarakat yang diharuskan memiliki partisipasi aktif, termasuk dalam hal tanggung jawab yang terbagi dimana tanggung jawab bukan hanya milik pemerintah pusat, tapi pemerintah provinsi dan kabupaten juga mengemban tanggung jawab |

|   |                                                                                                               |                                      |                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                               |                                      |                                              |     | tersebut guna menciptakan keamanan dan kenyamanan warga Indonesia terutama warga Desa Senepo Bupati Ponorogo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 | Sinkronisasi Peraturan Perundangan-undangan Dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana (2013).               | Wandasari, S. L.                     | Unnes Journal2                               | Law | Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sinkronisasi undang-undang dan peraturan penanggulangan bencana penting karena alasan sosiologis yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan budaya, dan faktor empiris untuk mendukung pertahanan masyarakat dan keadaan daerah terkait Studi tentang risiko, ancaman. Tingkat risiko yang menunjukkan kerentanan terhadap bencana alam. bencana serta kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat serta seberapa urgensi regulasi antara peraturan perundang-undangan pusat dan daerah. Model sinkronisasi vertikal didasarkan pada sinkronisasi sistem hukum, dan sinkronisasi tersebut juga terkait dengan asas-asas pengaturan hukum.. |
| 5 | Community Centered Mitigation Based on Science Literature to Reduce The Risk of Disaster in Indonesia. (2022) | Basuki Supartono, Ambari, & Rudi, M. | Indonesian Red Crescent Huminatarian Journal |     | Disasters pose a potential threat to the lives of Indonesians. The trend of disasters in Indonesia is increasing in number, type, impact and complexity of the problem. This has negative impacts on individuals, communities, nations and countries. Reducing this burden remains a common challenge. A simple measure to reduce the burden is to undertake risk reduction and disaster preparedness activities together with various stakeholders. The community's scientific mitigation efforts may provide an alternative solution model to overcome this problem..                                                                                                    |

|   |                                                                                                      |                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Early Earthquake Disaster Response Management: The BSMI Humanitarian Aid Experience in Turkey (2023) | Basuki Supartono, Rudi, M., & Muftisany, H. | Indonesian Red Crescent Humanitarian Journal | On February 6, 2023, the regions of Turkey and Syria were hit by a devastating earthquake during the winter season, resulting in numerous deaths, injuries, displacement and destruction of infrastructure. In response, the Turkish president appealed for international assistance, prompting the Indonesian Red Crescent to send a humanitarian aid team. The methods used included three phases: preparation, implementation and evaluation. The implementation phase included the coordination, cooperation and distribution of humanitarian assistance. The distribution of basic needs such as ready-to-eat food, winter clothing and medicine took place in the Turkish provinces of Hatay and Kahramanmaraş. Effective coordination with the Indonesian and Turkish governments has been established, as well as cooperation with Turkish humanitarian and medical organizations. In addition, plans for the further deployment of the medical team were examined. All activities were successfully implemented and received positive feedback. The Indonesian Red Crescent successfully provided critical assistance in response to the earthquake in Turkey. Efforts focused on various aspects, including distribution of aid, coordination with relevant authorities, collaboration with partner organizations and planning for the future. The results achieved were remarkable and had a positive impact. |
| 7 | The challenge in                                                                                     | Pan American                                | International Federation of                  | Risk management work in the water and wastewater sector should involve all stakeholders, from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                |                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| disaster reduction for the water and sanitation sector: improving quality of life by reducing vulnerabilities. | Health Organization. | Red Cross and Crescent Societies (IFRC). | authorities and regulators to local governments and the public. It should also be part of cross-sector work to reduce risks in communities. The expected contribution of the sector in emergencies and in reducing the vulnerability of the population requires that the sector participate in risk reduction measures, which should be considered as part of the lifelines of development. Conclusion: Dependence on water and sanitation during disasters: a political, social and economic issue 37 and community resilience. It must recognize that its contribution is fundamental to the health and well-being of the community and the need for sustainable services. In this regard, the active promotion of multi-sectoral national risk reduction platforms, which is one of the priority commitments of countries in the implementation of the HyogoFramework for Action 2005-2015, provides an important opportunity to include water and sanitation services. . in risk reduction measures. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Discussion

Kebutuhan akan kebijakan yang secara umum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan akan penanganan situasi bencana di Indonesia sudah menjadi hal yang harus segera dipenuhi, Dengan berbagai aspek yang dikaitkan sebagai bentuk tanggapan dari pemerintah selaku pemangku kebijakan dan regulasi perihal pelayanan kesehatan dalam penanganan situasi bencana di Indonesia yang ternyata tidak hanya terkait aspek kesehatan namun juga aspek yang lain seperti aspek ekonomi. Hal tersebut juga terdapat dalam telusur literasi yang dilakukan penulis dalam beberapa penelitian yang dilakukan terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim dalam Kerangka Kerja Menghadapi Kesiapan Bencana ( 2019) membahas terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi bencana adalah sebagai suatu muatan ilmu yang dimana oleh pemerintah dilakukan pengembangan(Kadafi, 2019), institusi profesional cepat tanggap darurat dan pemulihan, masyarakat, dan perorangan yang secara efektif mengatasi, menanggapi, dan pulih dari potensi dampak bahaya. Hal

ini bisa diwujudkan melalui Rencana tanggap bencana (disaster plan) yang berupa suatu catatan perencanaan yang melukiskan langkah-langkah dan prosedur pencegahan dan penanggulangan bencana. Penelitian lain yang dilakukan oleh J.Bohari dkk pada tahun 2021 membahas terkait Evaluasi Kebijakan Pemulihan Sektor Permukiman Pasca Bencana yang dilakukan dengan Metode CIPP Studi Kasus pada bencana Gempabumi Pidie Jaya pada tahun 2021. Pada penelitian tersebut memprioritaskan, dalam renovasi konstruksi dan pembangunan ulang menjadi lebih aman dan lebih baik berdasarkan pengurangan risiko bencana, peningkatan kapasitas dan kemandirian.dan mengutamakan persamaan gender, golongan beresiko, disabilitas serta adil. Peneliti lain dalam literasi berikutnya yang dilakukan oleh Rosando dkk pada tahun 2020 meneliti tentang Aspek Hukum dalam mitigasi bencana dengan lokasi penelitian di Desa Senepo Kabupaten Ponorogo. Penelitian tersebut membahas perkembangan positif pada aspek hukum dalam model sistem penanganan terjadinya bencana alam sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor Tahun 2007 Nomor 24. Dengan adanya regulasi dan sistem perundangan yang baru, maka landasan hukum berlaku secara umum tidak terbatas pada hal khusus serta mengikat untuk semua pihak.unit, komunitas dan organisasi non-pemerintah. Apabila dengan model lama masih menerapkan tanggap darurat bencana, model baru memiliki sejumlah proses, mulai dari mitigasi bencana, tanggap darurat, pemulihan(Harahap et al., 2023), hingga rekonstruksi. Penelitian ini juga meneliti akan adanya keharusan akan peran masyarakat untuk memiliki partisipasi aktif dalam masa tanggap darurat bencana. Dalam mewujudkan Sinkronisasi Peraturan Perundangan-undangan Dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana, peneliti Wandasari pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 sudah menemukan bahwa memperlihatkan bahwa sinkronisasi undang-undang dan peraturan penanggulangan bencana menjadi hal penting karena alasan sosiologis yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan budaya, dan faktor empiris untuk mendukung pertahanan masyarakat dan keadaan daerah. Selanjutnya oleh peneliti Basuki Supartono dalam jurnal internasionalnya yang berjudul Community Centered Mitigation Based on Science Literature to Reduce The Risk of Disaster in Indonesia. pada tahun 2022, memeliti terkait bencana mempunyai potensi ancaman terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Tren bencana di Indonesia semakin meningkat baik jumlah, jenis, dampak dan kompleksitas permasalahannya. Hal ini membawa dampak negatif bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara. Mengurangi beban ini masih merupakan tantangan bersama(Rostini, 2021). Upaya sederhana untuk mengurangi beban tersebut adalah dengan melakukan kegiatan pengurangan risiko dan kesiapsiagaan bencana bersama-sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya mitigasi ilmiah yang dilakukan masyarakat dapat memberikan model solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan ini. Pada penelitian lain yang dilakukan pula oleh peneliti Basuki Supartono pada tahun 2023 dengan lokasi penelitian di Turki dengan judul penelitian Early Earthquake Disaster Response Management:The BSMI Humanitarian Aid Experience in Turkey. Penelitian terhadap bencana pada tanggal 6 Februari 2023, wilayah Turki dan Suriah dilanda gempa bumi dahsyat selama musim dingin, yang mengakibatkan banyak kematian, cedera, pengungsian, dan kerusakan infrastruktur. Bulan Sabit Merah Indonesia untuk mengirimkan tim bantuan kemanusiaan(Maullasari, 2019). Metode yang digunakan meliputi tiga tahap: persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap pelaksanaannya meliputi koordinasi, kerja sama, dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Koordinasi yang efektif dengan pemerintah Indonesia dan Turki telah



terjalin, serta kerja sama dengan lembaga kemanusiaan dan medis Turki telah terjalin. Selain itu, rencana penempatan tim medis lebih lanjut juga diperiksa. Seluruh kegiatan berhasil dilaksanakan dan mendapat tanggapan positif (Potabuga, 2020). Upaya yang dilakukan terfokus pada berbagai aspek, termasuk distribusi bantuan, koordinasi dengan otoritas terkait, kolaborasi dengan organisasi mitra dan perencanaan ke depan. Hasil yang dicapai sungguh luar biasa dan memberikan dampak positif. Dalam Penelitian internasional sebelumnya yaitu pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Pan American Health Organization meneliti terkait ketergantungan pada air dan sanitasi selama bencana: masalah politik, sosial dan ekonomi dan ketahanan masyarakat. Dalam penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pemerintah harus menyadari bahwa kontribusinya sangat penting terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta kebutuhan akan layanan berkelanjutan. Dalam hal ini, promosi aktif platform pengurangan risiko nasional multi-sektoral, yang merupakan salah satu komitmen prioritas negara-negara dalam implementasi Hyogo Framework for Action 2005-2015, memberikan peluang penting untuk mencakup layanan air dan sanitasi. . dalam langkah-langkah pengurangan risiko selama masa tanggap darurat bencana (Rostini, 2021).

### Analisa Identifikasi Regulasi

Regulasi Perundangan yang digunakan menjadi dasar hukum pelayanan Kesehatan pada penanganan situasi bencana di Indonesia adalah (Daerah, 2023) :

- Regulasi berupa Undang- undang Tahun 2007 Undang- Undang Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana (UU No 24 Tahun 2007)
- Kebijakan Menteri berupa (Permenkes No 64 Tahun 2013 perihal Penanggulangan Krisis Kesehatan)
- Regulasi berupa Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah (PP) Tahun 2008 Nomor 21,22,23 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan juga perihal Peran Serta Institusi Internasional dan Institusi Asing Nonpemerintah dalam mengatasi Bencana
- Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala BNPB Tahun 2018 perihal Tata Cara menangani dan mengatasi warga yang mengungsi dari pada Keadaan Darurat Bencana (Perka No 3 Tahun 2018)

Peraturan Penanggulangan Bencana dinilai kurang komprehensif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga dalam hal ini DPR mengajukan usulan Pembaharuan Regulasi melalui Harmonisasi peraturan perundang-undangan serta adanya komunikasi terkoordinir pemerintah yang berada di pusat pemerintahan serta yang ada di daerah menjadi permasalahan pelik hingga saat ini. Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi VIII sudah memberikan persetujuan untuk pembahasan Rancangan Undang- undang Perihal Penanggulangan Bencana. RUU ini atas usul yang diperoleh karena ide dan usulan dari anggota Dewan. Rancangan Undang- undang tersebut yang akan menggantikan [Undang- undang Tahun 2007 Nomor 24](#) tentang Penanggulangan Bencana. Adanya kondisi yang berubah ini disebabkan oleh karena adanya pengalaman permasalahan dalam menangani musibah bencana non alam Pandemi Covid 19 menunjukkan terdapat kekurangan dalam Undang- undang Tahun 2007 Nomor 24, meliputi komunikasi dinas terkait, mitigasi risiko dan pencegahan bencana, serta keresehan petinggi pemerintahan dalam memberikan ketetapan perihal status bencana hal ini berakibat timbul [kasus terkait hukum](#) di masyarakat yang disebabkan oleh karena ada

hambatan melaksanakan hal yang wajib dalam hukum. Peraturan Perundangan yang lama belum memberikan aturan secara rinci terkait hal yang menjadi ketetapan dalam status bencana dan keterlibatan bantuan asing. (Hukum Online, 2023) DPR sudah menyetujui RUU dengan substansinya lebih menyeluruh jika dilihat perbandingannya dengan Undang- undang Tahun 2007 Nomor 24. Hal lain yang ditemukan adalah peran kepemimpinan local (Sari, 2018) yang diakui masyarakat, adalah edukasi dan ilmu kewarga negaraan dan pemerintahan kepemimpinan setempat cenderung tidak teralokasi dalam kebijakan di pimpinan pusat, sehingga dalam hal ini teakomodirnya kepemimpinan lokal yang diakui dalam Undang- undang Penanggulangan Bencana yang baru.

### **Pelayanan Kesehatan Dalam Situasi Bencana**

Klasifikasi jenis bencana menjadi 3 macam sesuai dengan Ragulasi Perundang- undangan Tahun 2007 Nomor 24 , yaitu terdiri dari bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Dalam Undang- undang dijelaskan Langkah tahapan pelaksanaan penanganan bencana melingkupi :1) Prabencana, dalam tahapan ini dilaksanakan perencanaan kegiatan penanganan musibah bencana, meminimalisir terjadinya resiko bencana, mencegah, dan melakukan pengarahannya dalam rencana pembangunan, syarat analisa resiko bencana, rencana penegakan tata ruang, edukasi dan serta memberikan pelatihan dan pengetahuan serta menentukan syarat standar teknis penanganan bencana (siap siaga, peringatan dini dan mitigasi bencana). 2)Tanggap darurat, tahapan yang mencakup kajian area bencana, terjadinya kerusakan dan sumber daya, menentukan keputusan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi korban, terpenuhinya kebutuhan dasar, layanan psikososial serta kesehatan. 3)Paskabencana, tahapan ini meliputi aktivitas rehabilitasi (perbaikan area bencana, fasilitas dan sapras umum, bantuan renovasi rumah, sosial, psikologis, layanan kesehatan, keamanan dan ketertiban) dan pembuatan konstruksi baru (Konstruksi, pemulihan serta perbaikan fasilitas prasarana, mencakup fungsi layanan kesehatan)(Amin et al., 2019).

Undang- undang tahun 2007 Nomor 24 dalam Pasal 53 dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan mendasar yang wajib dalam hal pemenuhannya saat terjadi keadaan bencana, Regulasi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Permenkes Tahun 2013 Nomor 64 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan pada Bab III. Pelaksanaan Penanganan Krisis Kesehatan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 diatur bahwa Pelaksanaan penanggulangan Krisis kesehatan berpedoman pada alur siklus penanggulangan Bencana dengan penyesuaian yang meliputi tahap prakrisis kesehatan, tanggap darurat krisis kesehatan, serta pascakrisis kesehatan dengan fokus pada upaya pencegahan terjadinya Krisis Kesehatan yang berisiko tidak baik dengan melihat unsur minimalisir terjadinya resiko bencana.

### **Terjadinya Masalah Pelayanan Kesehatan Yang Terdapat Pada Fase Tanggap Darurat Keadaan Bencana Alam**

Akibat yang terjadi oleh karena terjadinya bencana adalah menurunnya kualitas Salah satu dampak hencana yang akan terjadi bila terkena akibat dari terjadinya musibah penurunan kualitas hidup penduduk yang dapat dinilai dari segala masalah yang terjadi dalam bidang kesehatan masyarakat. Musibah banjir, gempa bumi,, letusan gunung berapi, longsor, dalam waktu dekat bisa menimbulkan dampak terjadinya korhan tewas, korhan luka berat yang perlu perawatan intensif, risiko meningkatnya penyakit menular,



terjadinya kerusakan fasilitas kesehatan dan sistem penyediaan air (Pan American Health Organization, 2006). Munculnya permasalahan kesehatan berawal dari kekurangan air yang bersih serta berdampak negatif terhadap pengaruh kebersihan diri, pengaruh buruk terhadap kebersihan kesehatan lingkungan yang menjadi permulaan heherapa jenis penyakit menular yang berkembang. Persediaan makanan yang tidak terpenuhi menjadi permulaan proses derajat kesehatan yang menurun. Pada jangka panjang akan memberikan pengaruh secara langsung tingkat kebutuhan gizi yang terpenuhi bagi para korban bencana, serta terdapatnya tempat tinggal untuk pengungsian (shelter) pengungsian tempat tinggal (shelter) yang tidak memenuhi syarat kelayakan, pemberian pelayanan kesehatan pada keadaan bencana ditemukan banyak permasalahan sebagai dampak fasilitas kesehatan yang rusak akibat bencana. Permasalahan lain yang ditemui adalah tidak terpenuhinya kebutuhan obat dan alat kesehatan bahan medis yang diperlukan, belum terpenuhinya dan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang tersedia demikian juga ketersediaan finansial untuk operasional. Serta keterjadian nilai kehamilan yang meningkat oleh karena pelayanan KB dengan akses terbatas (Basri et al., 2019).

Undang-Undang Tahun 2007 pasal 55 ayat 2 perihal Penanganan Bencana menyebutkan yang termasuk di dalam klasifikasi golongan rentan mencakup Ibu, Bayi, balita dan anak-anak, Ibu hamil dan Ibu Laktasi, para penderita disabilitas dan Orang yang sudah lanjut usia serta orang sakit. Golongan penduduk yang rentan tersebut juga terdapat dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 perihal Pedoman Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2008). Usaha perlindungan diutamakan untuk golongan rentan tersebut, meliputi penyelamatan, pengalokasian ke area yang lebih aman, pengamanan sampai dengan pelayanan kesehatan dan psikososial. Sanitasi adalah salah satu kebutuhan vital pada tahap awal bencana. Semua usaha tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya layanan kesehatan bagi para pengungsi dan korban bencana sesuai dengan pedoman standar minimal layanan kesehatan. Hal ini dilakukan dalam hal terpenuhi unsur pemusnahan dan unsur penyebaran penyakit menular bagi korban bencana dan pengungsi yang memenuhi minimal standar Kesehatan, gizi serta pangan sandang (Jamilah, 2020).

### Solusi Hukum

Diperlukan solusi hukum untuk mengatur perlunya pedoman dalam hal mengatur Pelayanan Kesehatan di Indonesia dalam menghadapi situasi bencana saat terjadi gempa bumi. Peraturan perundang-undangan Tahun 2007 Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana serta Peran serta organisasi internasional dan institusi asing nonpemerintah dalam penanganan bencana telah memiliki pedoman pengaturan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang terdapat dalam Bab III Pasal 7 ayat 1 huruf d dan ayat 2 juga dalam Bab VI Pasal 30 dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 dan 23 perihal Keterlibatan Peran Serta Lembaga internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Organisasi internasional dan institusi asing nonpemerintah dapat turut memiliki peran serta ikut menanggulangi bencana jika pemerintah memberikan pernyataan membutuhkan dan atau memberikan penerimaan atas penawaran bantuan yang sesuai dengan regulasi perundang-undangan serta memenuhi segala jenis yang dibutuhkan dan menjadi kebutuhan di area yang tertimpa bencana (Puspasari, 2021). Peraturan yang

dikeluarkan berupa Kebijakan dari Kementerian terkait yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa Permenkes Tahun 2013 Nomor 64 perihal Penanggulangan Krisis Kesehatan. Pedoman yang dikeluarkan oleh badan terkait yaitu BNPB pada tahun 2008 melalui Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2008 Nomor 7 perihal Pedoman untuk Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Solusi hukum tersebut diharapkan bisa mengatasi situasi bencana di Indonesia terutama dalam hal pelayanan Kesehatan bagi masyarakat. Implikasi kekosongan hukum terhadap pelayanan kesehatan dalam situasi bencana alam adalah belum terdapatnya peraturan regulasi dari pemerintah yang secara khusus berisi aturan tentang standar minimal pelayanan kesehatan dalam penanggulangan situasi bencana alam supaya bisa terpenuhi segala permasalahan kesehatan yang terjadi saat situasi bencana alam di Indonesia (Maksum et al., 2023).

Implikasi hasil penelitian yang dapat diterapkan adalah dapat mengatur segala permasalahan kesehatan tentang penanggulangan tanggap darurat situasi bencana alam di Indonesia. Dengan regulasi baru tersebut maka terdapatnya Standar Pelayanan Minimal dapat mengatasi kendala yang terjadi dalam penanganan situasi bencana alam di Indonesia. Rekomendasi untuk segera dibuat regulasi terbaru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat bencana melalui usulan Peraturan Regulasi Baru, Harmonisasi regulasi undang-undang serta komunikasi antara pemerintah pusat dengan tingkat daerah terutama dalam hal mitigasi bencana (Rosando, 2020) dimana Rancangan Undang-undang ini akan menjadi pengganti dari Undang-undang Tahun 2007 Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana. Kontribusi penelitian yang dilakukan terhadap teori yang ada memiliki dampak positif. Dimana dampak positif tersebut dapat memperkaya pemahaman serta dapat mengisi celah pengetahuan yang saat ini ada. Pentingnya hasil penelitian ini adalah untuk tercapainya tujuan penelitian yaitu mendapatkan standar pelayanan minimal kesehatan saat tanggap darurat situasi bencana alam gempa bumi (bin Abu Bakar, 2019).

## Simpulan

Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan kebijakan yang secara umum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan akan penanganan situasi bencana pada fase tanggap darurat bencana di Indonesia menjadi hal yang harus segera dipenuhi. Tanggapan dari pemangku kebijakan dan regulasi menyangkut ke berbagai aspek tidak hanya sektor kesehatan namun juga ekonomi dan sektor lainnya. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh para penulis menunjukkan bahwa banyak sektor yang harus diperhatikan dalam menanggapi situasi tanggap darurat bencana di Indonesia. Sehingga dalam beberapa penelitian juga meneliti adanya strategi persiapan dan kebutuhan akan peran aktif masyarakat dalam merespon situasi bencana. Demikian juga berdasarkan studi kasus akan musibah gempa di Turki pada bulan Februari tahun 2023 dimana dilakukan bantuan oleh organisasi kemanusiaan Indonesia yaitu Bulan Sabit Merah Indonesia dengan membawa bantuan kemanusiaan. Metode yang digunakan meliputi tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan koordinasi yang efektif maka metode tersebut sukses dalam memberi tanggapan darurat akan bencana yang terjadi.



Kontribusi penelitian yang dilakukan terhadap teori yang ada memiliki dampak positif. Dimana dampak positif tersebut dapat memperkaya pemahaman serta dapat mengisi celah pengetahuan yang saat ini ada. Pentingnya hasil penelitian ini adalah untuk tercapainya tujuan penelitian yaitu mendapatkan standar pelayanan minimal kesehatan saat tanggap darurat situasi bencana alam gempa bumi. Keterbatasan penelitian adalah keterbatasan sumber data dan jumlah artikel yang melakukan penelitian terhadap hal ini masih terbatas. Keterbatasan waktu peneliti dalam melakukan penelitian juga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Hal ini akan membawa pengaruh terhadap generabilitas hasil penelitian.

Pemahaman merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan aksi kemanusiaan. Pemahaman ini berfungsi sebagai landasan untuk pemecahan masalah dan menyiapkan langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah yang ada. Praktisi kemanusiaan harus memahami secara mendalam tantangan yang mereka hadapi, seperti dampak bencana gempa bumi. Gempa bumi menghancurkan bangunan, kerusakan infrastruktur, korban jiwa, cedera, dan timbulnya penyakit. Banyak orang yang mengungsi dan dibiarkan tanpa tempat berlindung, mengalami suhu dingin, sakit, haus, dan kelaparan. Akibat buruk dari gempa bumi menimbulkan kesulitan besar bagi umat manusia. Kewajiban moral kita adalah memberikan bantuan yang memenuhi kebutuhan khusus para korban gempa bumi dan memberikan kontribusi untuk meringankan penderitaan mereka.(Supartono et al., 2023)

## Saran

Saran penelitian ini segera di masa mendatang dibuat regulasi terbaru yang dapat memenuhi pelayanan kesehatan yang menjadi kebutuhan masyarakat saat tanggap darurat situasi bencana melalui usulan Regulasi peraturan Baru. Harmonisasi regulasi undang-undang serta komunikasi pemerintahan pusat dan daerah terutama dalam hal mitigasi bencana (Rosando, 2020). Rancangan Undang- undang ini akan menjadi pengganti Undang- undang Tahun 2007 Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana. Pertanyaan selanjutnya di masa mendatang adalah bagaimana monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dari regulasi terbaru. Rekomendasi melalui keputusan DPR yang memberikan persetujuan untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang- undang serta membuat materinya secara menyeluruh jika dilakukan perbandingan terhadap Undang- undang Tahun 2007 Nomor 24. Sehingga tidak hanya dilakukan koreksi, tetapi diubah secara keseluruhan, dan menghasilkan Peraturan Undang- undang baru, sudah menjadi langkah tepat dan disarankan untuk meneruskan proses revisi ini supaya ada kontribusi untuk perubahan berkesinambungan sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dalam situasi penanganan bencana alam di Indonesia.

## Daftar Pustaka

Amin, M., Fridani, L., & Marjo, H. K. (2019). Penerapan Pendekatan Konseling Islami Untuk Meningkatkan Kecerdasan Interpersonal Peserta Didik SMA Negeri 15 Jakarta. ... : Jurnal Bimbingan Konseling. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/view/5579>

- Basri, A. S. H., Mlusyryfin, Z., Anwar, M. K., & ... (2019). Pengembangan Model Keilmuan Bimbingan dan Konseling Islam Melalui Jurnal Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam. ... KONSELING ISLAM .... <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57834/>
- Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI). (2020). Sebaran kejadian bencana tanggal 1 Januari-31 Desember 2020. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). <https://dibi.bnpb.go.id/>
- bin Abu Bakar, A. S. (2019). Bimbingan konseling Islam untuk mengatasi depresi di hospital Bintulu Malaysia. Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/anida/article/view/7281>
- Bohari, J. A. P. P. W., Puspasari, P., & Wilopo. (2021). Evaluasi kebijakan pemulihan sektor permukiman pasca bencana dengan metode CIPP: Studi kasus gempabumi Pidie Jaya. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana, 12(1), 1–10.
- BPBD Jogjakarta. (2023). Kumpulan peraturan BPBD. <https://bpbd.jogjakota.go.id/page/index/kumpulan-peraturan>
- Hafid, A., Zahro, I. F., & Al-Husain, R. A. (2022). Pembinaan Akhlak Melalui Pendekatan Behavior. ... Bimbingan Dan Konseling Islam. <https://ojs.attanwir.ac.id/index.php/jbki/article/view/234>
- Hakim, L. (2019). Kerangka kerja menghadapi kesiapan bencana. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana, 10, 1–11.
- Harahap, A. P., Khairi, M. H., & ... (2023). Implementasi bimbingan konseling Islam terhadap kenakalan remaja di era digital. ... Dan Konseling .... <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11593>
- Idris, M., & Ziaulhaq, W. (2022). Model Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Memperkokoh Kualitas Pengetahuan Pemuda yang Majemuk Melalui Pendekatan Humanis Di Kecamatan .... SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan .... <https://www.journal.literasisains.id/index.php/sosmaniora/article/view/187>
- Jamilah, S. (2020). Bimbingan konseling dan implementasinya dalam pendidikan islam. ... : Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam. <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/kreatif/article/view/560>
- Kadafi, A. (2019). PEDOMAN PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAMI DI SEKOLAH. eprint.unipma.ac.id. <http://eprint.unipma.ac.id/id/eprint/90>
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional. (2010). Pedoman peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah pada saat tanggap darurat. Badan Penanggulangan Bencana Nasional. <https://bnpb.go.id/storage/app/media/uploads/migration/pubs/31.pdf>
- Maksum, M., Himmawan, D., & ... (2023). Fitrah Manusia Dalam Konsep Bimbingan Konseling Islam Menurut Anwar Sutoyo. ... Bimbingan Konseling .... <https://counselia.faiunwir.ac.id/index.php/cs/article/view/71>





- Maullasari, S. (2019). Metode Dakwah Menurut Jalaluddin Rakhmat dan Implementasinya dalam Bimbingan dan Konseling Islam (BKI). *Jurnal Ilmu Dakwah*. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/3975>
- Pan American Health Organization. (2006). The challenge in disaster reduction for the water and sanitation sector: Improving quality of life by reducing vulnerabilities. In Pan American Health Organization (Ed.), *Pan American Health Organization* (pp. 1–35). International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC).
- Potabuga, Y. F. (2020). Pendekatan Realitas dan Solution Focused Brief Therapy dalam Bimbingan Konseling Islam. ...: *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/altazkiah/article/view/1833>
- Ramdan, M. (2020). Sinergitas Bimbingan Konseling dan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pengembangan Karakter Siswa di Smk Negeri 1 Gunungputri. *Inspiratif Pendidikan*. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/16191>
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta, Indonesia: Pub. L. No. 24, JDIH BPK 1.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Jakarta, Indonesia: Pub. L. No. 23, JDIH BPK 1.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan. Jakarta, Indonesia: Pub. L. No. 64, JDIH BPK 1.
- Riyadi, A., Hadziq, A., & Murtadho, A. (2019). Bimbingan konseling Islam bagi pasien rawat inap di rumah sakit Roemani Muhammadiyah Semarang. *Jurnal SMART (Studi ....* <https://journal.blasemarang.id/index.php/smart/article/view/736>
- Rofiq Hidayat. (2021, December 13). Catatan LBH Jakarta terkait kelemahan RUU Penanggulangan Bencana. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-lbh-jakarta-terkait-kelemahan-ruu-penanggulangan-bencana-lt61b6f6291c557>
- Rosando, A. F., Widhiarto, H., & Raissa, A. (2020). Aspek hukum dalam mitigasi bencana di masyarakat desa Senepo Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community*, 2(1), 67–84.
- Rostini, R. (2021). Teori Dan Pendekatan Konseling Sfbt (Solution Focused Brief Therapy) Berbasis Islam. *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/taujih/article/view/11743>
- Sari, R. H., Husin, T., & Syamsidik. (2016). Kearifan lokal smong masyarakat Simeulue dalam kesiapsiagaan bencana 12 tahun pasca tsunami. *Jurnal Ilmu Kebencanaan (JIKA) Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(1), 27–32.
- Supartono, B., Ambari, M. D., & Rudi, M. (2022). Community-centered mitigation based on science literature to reduce the risk of disaster in Indonesia. *Indonesian Red Crescent Humanitarian Journal*, 1(1), 26–33.

- Supartono, B., Rudi, M., & Muftisany, H. (2023). Early earthquake disaster response management: The BSMI humanitarian aid experience in Turkey. *Indonesian Red Crescent Humanitarian Journal*, 2(1), 33–48.
- Triatmojo, W. (2021). Implementasi bimbingan dan konseling islam: studi meningkatkan nilai-nilai spiritual pada remaja pacaran. ... *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Irsyad/article/view/3463>
- Wandasari, S. L. (2013). Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan pengurangan risiko bencana. *Unnes Law Journal*, 2(2), 1–14.
- Yasin, M. (2023, October 15). Regulasi penanggulangan bencana kurang komprehensif: DPR usulkan undang-undang baru. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/regulasi-penanggulangan-bencana-kurang-komprehensif--dpr-usulkan-undang-undang-baru-lt5f360b61bab05>

